ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google,

https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i3.6471

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN *GOOD GOVERNANCE* MENURUT IBNU TAIMIYAH DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT INDONESIA

Implementation of the Good Governance System According to Ibn Taimiyah in the Development of Indonesian Society

Muhammad Azrul Amirullah & An-Nafsi Ma'rifatul Huda
Universitas Darussalam Gontor
amirullahazrul15@gmail.com; annafsimarifatulhuda@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 15, 2025	Jun 12, 2025	Jun 24, 2025	Jun 29, 2025

Abstract

The integration of Islamic values into local governance practices is a critical priority in the context of community development at the village level, given the strategic role of village governments in public service delivery, budget management, and the empowerment of citizen participation. This study aims to examine the implementation of good governance principles, based on the thought of Ibn Taymiyyah, within village governance practices in East Java. A qualitative approach was employed, using literature review and in-depth interviews with village heads across several regions. The findings reveal that Ibn Taymiyyah's concept of good governance emphasizes public welfare through the development of strategic sectors such as politics, society, education, and the economy. At the core of sound governance is social justice, which, according to Ibn Taymiyyah, must be realized by the state or governing authorities, regardless of the form or name of the institution. Field implementation shows that many villages have begun to adopt these principles through mechanisms such as village deliberations (*musyawarah desa*), budget transparency, and the establishment of internal oversight bodies. However, challenges remain in strengthening integrity, leadership ethics, and the consistent

Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

application of Islamic values. The study concludes by underscoring the importance of enhancing the moral and spiritual capacity of local leaders and the need for systematic integration of Islamic values into village governance. The implications include contributions to the literature on the Islamization of public governance and policy recommendations for ethically grounded village development.

Keywords: Good Governance; Islamic Values; Village Governance; Ibn Taymiyyah; Social Justice

Abstrak: Integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik pemerintahan lokal menjadi urgensi utama dalam konteks pembangunan masyarakat di tingkat desa, mengingat posisi strategis pemerintah desa dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pemberdayaan partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip *good governance* menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam praktik pemerintahan desa di Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap kepala desa di sejumlah wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan kemaslahatan umat melalui pembangunan sektor-sektor strategis seperti politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Pusat dari tata kelola yang baik adalah keadilan sosial, yang menurut Ibnu Taimiyah harus diwujudkan oleh negara atau pemerintah, tanpa memandang bentuk dan nama institusinya. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa mulai menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui mekanisme musyawarah desa, transparansi anggaran, dan pembentukan lembaga pengawasan internal. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek penguatan integritas, etika kepemimpinan, dan konsistensi pelaksanaan nilai-nilai keislaman. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas moral dan spiritual pemimpin lokal serta perlunya integrasi sistematis nilai-nilai keislaman dalam tata kelola pemerintahan desa. Implikasi penelitian mencakup pengembangan literatur tentang islamisasi tata kelola publik serta rekomendasi kebijakan pembangunan desa berbasis etika Islam.

Kata Kunci: Good Governance; Nilai Keislaman; Pemerintahan Desa; Ibnu Taimiyah; Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Sistem adalah sebuah kaedah tersusun yang mengantar pada aspek dan tujuan tertentu. Sedangkan kenegaraan adalah bagian dari sistem tersebut sehingga membentuk sebuah tata kelola. Islam datang dan membangun sistem pemerintahan sejak masa Rasulullah SAW, yang Ketika itu Rasulullah telah membuat sebuah perjanjian yang di saksikan oleh banyak kabilah di Madinah yaitu Piagam Madinah. Rasulullah SAW tidak hanya utusan Allah SWT saja, tetapi sebagai pemimpin yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat bahkan dunia, berawal dari membentuk negara Madinah dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan tempatan dan ajaran Islam (S. Nasution et al., 2023). Maka dari itu, sistem yang

dibentuk dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan sebuah peradaban yang sebelumnya merupakan bangsa yang saling bermusuhan dan saling berebut kekuasaan. Tujuan Rasulullah SAW merancang pengelolaan tata negara untuk meletakakn dasar-dasar yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Jika kita bandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang, pemerintahan beliau memiliki karakter demokratis yang lebih kuat, sesuatu yang sangat menarik bagi para sejarawan politik (Syam, 2015).

Pengaruh Rasulullah SAW terhadap pembangunana pemerintahan memberikan dampak yang baik atau *good governance* bagi seluruh umat manusia. Banyak cendekiawan muslim yang telah mendefinisikan *good governance* contohnya adalah Ibnu Taimiyah (Noveri, 2019). Ibnu Taimiyah memberikan konsep pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang digabungkan dalam aspek pemerintahan. Ia menyinggung adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kritis terhadap pemerintahan Islam. Kemudian, Ibnu Taimiyah menemukan metodologi yang mempermasalahkan praktik-praktik kehidupan dan pandangan di masanya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, Ibnu Taimiyah mengahruskan penegakan syariat-syariat Islam, dan dalam syariat-syariat tersebut diatur tentang kenegaraan (Ash-Shufi et al., 2021).

Pada salah satu karya Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal yaitu Siyasah Syar'iyyah dapat dikatakan sebagai salah satu pembahasan politik yang dinamis. Menurut Abdul Wahhab, siyāsah didefinisikan sebagai penyusunan peraturan demi tercapainya kemaslahatan. Sementara itu, istilah *dustūri* berasal dari bahasa Persia yang berarti sosok yang memiliki kewenangan, baik dalam urusan politik maupun agama (Muslimin, 2020). Ibnu Taimiyah tidak hanya membahas aspek politik, tetapi juga moralitas, etika kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin. Pemikirannya sangat relevan untuk dijadikan landasan normatif dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Kholid, 2024).

Namun dalam praktiknya, belum banyak kajian yang secara langsung mengkaji implementasi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks pemerintahan modern di Indonesia, terutama pada level desa. Padahal, nilai-nilai Islam seringkali menjadi acuan moral informal bagi para pemimpin lokal, terutama di daerah seperti Jawa Timur yang memiliki tradisi keislaman kuat. Maka dari itu, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa serta bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali secara lebih mendalam praktik-praktik pemerintahan desa di Jawa Timur dalam perspektif *good governance* ala Ibnu Taimiyah, serta menilai keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan sekaligus memperkuat basis etika dan spiritualitas dalam tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip *good governance* menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam praktik pemerintahan desa di Jawa Timur terhadap pembangunan masyarakat Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi konsep-konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemikiran Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan konteks pembangunan masyarakat di Indonesia berdasarkan di lapangan terutama dalam kebijakan intansi di pemerintah desa. Penelitian ini secara keselurusahan baik secara pustaka dan lapangan yaitu 3 Januari sampai 27 Februari 2025.

Data dikumpulkan dari dua sumber yaitu sumber utama dari buku-buku karya Ibnu Taimiyah, dokumen resmi pemerintahan, dan hasil wawancara observasi kepada beberapa lembaga pemerintah terutama di tingkat Desa, dengan memfokuskan beberapa pemerintah desa di Jawa Timur. Sumber tambahan berdasarkan karya penelitian dan tulisan-tulisan akademik yang relevan dengan tema *good governance* dan pembangunan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara mendalam isi teks untuk menemukan nilai-nilai, prinsip, dan gagasan yang terkandung dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip *good governance* modern serta praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai referensi yang kredibel dan otoritatif.

HASIL

Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Nama lengakp beliau adalah Ahmad Taqi al-Din Abu Al-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Abd-Salam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah. Beliau lahir pada 22 Januari 1262 di daerah Harran, dekat Damaskus, beliau berasal dari keluarga ulama Negeri Syiria. Keluarga beliau menganut ajaran madzhab Hambali, sang kakek yaitu Abdus Salam adalah ulama terkemuka di Baghdad yang pada masa itu menjadi ibu kota dari KeKhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluargannya ke daerah damasjus, karena pada saat itu bangsa Mongol menyerang secara besar-besaran ke kota dimana Ibnu taimiyah lahir. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolotan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Pada saat itu beliau baru berusia enam tahun..

Beliau tumbuh dalam lingkungan ilmiah dan shalihah ini. Dia pertama kali belajar dari ayahnya dan ulama-ulama Damaskus. Beliau telah mempelajari fikih, hadits, ushul, dan tafsir serta menghafal Al Quran sejak kecil. Dia disebut sebagai orang yang cerdas sejak kecil, memiliki hafalan yang kuat, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian, beliau belajar secara menyeluruh dan mendalam tentang subjek tersebut. karena pada masa mudanya, dia mengumpulkan syarat-syarat mujtahid. Tidak lama setelahnya, sebelum berusia 30 tahun, beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh para ulama besar karena ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama. Ibnu Taimiyah wafat Ketika beliau dimasukkan dalam penjara Qal`ah Dimasyq dan hal tersebut disaksikan oleh muridnya sendiri yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika Ibnu Taimiyyah membaca surat Al-Qamar yang berbunyi *"Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin"* yang mana pada saat itu beliau mengalami sakit sekitar dua puluh hari lebih.

Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah telah menjelaskan mengenai teori pemerintahan yang dapat di laksanakan atau dijalankan oleh masyarakat, beliau mengangkat beberapa perihal teroi pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. *Walayat* (Kekuasaan dan Bagaimana Cara Pengangkatannya)

   Dalam kitab karya Ibnu Taimiyah yang berjudul Siyasah Syar"iyah, beliau mengutarakan bahwa suatu kewajiban dari serorang pemimpin sebuah wilayah untuk

mengangkat orang paling mahir pada sektor pemerintahan dan layak dia dapati untuk menyandang tugas tersebut. Metodologi untuk mengetahui yang layak dalam penagngkatan, menurut Ibnu Taimiyah ialah ketika Seorang pemimpin yang mencurahkan segenap kemampuannya untuk memperbaiki urusan agama dan keduniaan semampu mungkin adalah tokoh pada zamannya dan juga mujahid yang paling kuat di jalan Allah. Selain itu, pemilihan dilaksanakan dengan menggunkan sistem undian dalam kasus di mana ada dua calon yang memiliki keunggulan dan kekurangan yang seimbang, dan sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling cocok dan layak.

2. Sumber Hukum dan Perundang-undangan Syari'at

Islam juga mengatur konsep pemerintahan, maka dari itu Ibnu Taimiyah juga menekankan pada konsep hukim Islam yang bersandar pada Al-Qur'an sebagai kalam Illahi, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang digunakan sepanjang masa dan tidak menyimpang.

3. Kedaulatan

Al-Qur'an telah menjjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorag khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dengan penjelasan berdsarkan Al-Qur'an tentang kepemimpinan, tidak ada lagi perbedaan antara yang dibutuhkan oleh manusia akan pemerintahan dan kekuatan Allah.

Oleh karena itu mendirikan sebuah kekuasaan Islam merupakan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan umat, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasannya otoritas pemerintah dan pemimpin diberikan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dipilih. Pemerintahan dan kepemimpinan menurut beliau sangatlah penting.

4. **Ulama dan Umara**

Syari'at Islam juga telah menjelaskan bahwa manusia yang memiliki pengaruh ada dua yaitu para ulama (orang-orang berilmu) dan umara (para pemimpin), menurut Ibnu Taimiyah Para pemimpin negara-negara Islam harus fokus pada penegakan hukum syari'ah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Para ulama dianggap melakukan dua tugas padai tingkat kekuasaan: menafsirkan dan menegakkan hukum syari'ah serta membangun sistem keadilan. Tanggung jawab para umara adalah menjaga negara Islam dan mendukung pelaksanaan hukum Allah. Menurut Ibn Taimiyah, ulama

dan ulama adalah orang-orang yang disebut dalam Qur'an sebagai "Ulu al-Amr, atau mereka yang memerintah, pihak yang harus ditaati oleh umat Islam." Selain itu, ia menyatakan bahwa kelompok tersebut terdiri dari individu terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer. Keberanian, kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk berpikir logis.

5. Bentuk Negara

   Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan jenis konstitusi negara Islam yang mana. Ketika Ibn Taimiyah menerima keberadaan sebuah negara, dia menggunakan pendekatan analisis sosiologis daripada kepentingan agama. Ibnu Taimiyah menginginkan kepada para ulama dan umara memimpin negara dalam kerja sama untuk menggapai tujuan umum dengan menerapkan hukum-hukum syari'ah.

6. Proses Politik

   Proses politik yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah mencakup tiga hal yaitu Ummah (Badan Politik), Baiah (Bentuk Pemilihan), Syura (Bentuk Konsultasi). Tiga gagasan tersebut bagi Ibnu Taimiyah sangat lah penting, *pertama* konsep Ummah merupakan hal terpenting bagi umat muslim karena dapat membentuk ikatan yang kuat dalam mengamalkan agama Islam sehingga peranan Ummah dalam agama Islam adalah membentuk tali solidaritas atau *ukhuwah* yang tinggi. *Kedua,* yaitu konsep Baiah yang menjelaskan bahwa pemimpin Negara Islam yang juga merupakan pemimpin masyarakat ialah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui beberapa proses pemilihan yang melibatkan konsultasi pendahuluan seperti yang tersebut di atas. Kriteria proses menurut beliau terangkum dalam beberapa hal yaitu: (a) memperoleh dukungan dari suara mayoritas orang-orang muslim, (b) mendapatkan dukungan dari unsur-unsur pemmegang kekuasaan dalam ranah masyarakat. *Ketiga* yaitu konsep Syura (Bentuk Konsultasi) yang berisikan tentang musyawarah muafakat guna menyelesaikan permasalahan jikalau dalam pemerintahan terdapat perselisihan diantara kaum muslimin.

Tata Kelola Pemerintahan Yang *Good governance* dan Aspeknya

Tata kelola pemerintahan, juga dikenal sebagai *good governance*, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" memiliki arti menyuruh untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memiliki

wewenang pada suatu negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Pemerintahan adalah struktur yang mana didalamnya ada sistem Lembaga negara yang memiliki peran dalam menjalankan roda kepemimpinan yang berlaku pada sebuah negara, maka tugas tersebt harus di emban oleh pemerintah ataupun orang yang memiliki wewenangan untuk memimpin. Dengan adanya pemimpin, maka dapat terbentuklah yang Namanya sistem tata kelola yang baik guna membangun sistem solid dan penuh dengan tanggung jawab dan sejalan dengan prinsip hak manusia.

Pemerintah dalam pengertian yang luas merujuk pada konsep klasik yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* (Jiwa Undang-Undang), dan kemudian dikembangkan oleh Immanuel Kant melalui gagasan *trias politica*. Konsep ini membagi kekuasaan negara atau fungsi pemerintahan menjadi tiga cabang utama yang berdiri secara independen dan tidak saling mencampuri. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki satu fungsi khusus, yaitu: (1) Kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab melaksanakan undang-undang atau menjalankan pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif berperan dalam menegakkan hukum melalui proses peradilan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *good governance* sendiri telah dibahas dalam berbagai konteks dan menjadi masalah utama dalam pengelolaan pemerintahan. Ini terjadi karena bagian dari tradisi lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sesuai dengan struktur masyarakat yang berubah. Dengan kata lain, pemerintahan semakin tidak efektif meskipun demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan meningkat, kemudian salah satu dari elemen penting dalam membentuk sistem penyelengaraan negara yang terbuka adalah public untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemerintahan, seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemerintahannya untuk membangun sisitem pemerintahan yang baik maka dia harus memiliki pengaruh besar atas orang-orang yang dipimpinnya yang menghasilkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilam sehingga membentuk beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

a. Penguasa merupakan alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan setiap fungsi dalam sistem pemerintahan.
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai penghubung untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
e. Rakyat memiliki kewenangan untuk meminta hak nya kepada para pemimpin

Meskipun demikian, tidak selalu semua daripada tindakan pemerintahan tersedia peraturan undang-undang yang mengaturnya. Ada kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangannya belum ada dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah harus segera menyelesaikan masalah nyata masyarakat. disponsori. Dalam situasi seperti ini, pemerintah diberi kekuasaan diskresioner, atau kebebasan bertindak, melalui freies Ermessen. Freies Ermessen adalah metode yang memungkinkan pejabat atau lembaga administrasi negara bertindak tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Memahami konsep *Good governance* dalam pandangan Ibnu Taimiyah mesti dilakukan secara komprehensif, Terlebih lagi gagasan Ibnu Taimiyah juga dalam hal ini tidak secara gamblang sebagaimana diutarakan oleh ulama yang lain. Dalam sebuah adagium yang populer, beliau menyatakan bahwa, "Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sedangkan balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa 'Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman".

Dalam pandangan *Good governance* atau sistem pemerintahan yang baik maka Ibnu Taimiyah telah mendeklarasikan pandangan tentang keadilan, baginya keadilan merupakan titik terpenting dalam sistem pemerintahan dengan keadilan juga semua sektor pada seluruh penerintahan akan berjalan dengan baik. Negara harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, menurut Ibn Taimiyah. Menurutnya, keadilan sosial berkaitan dengan hak-hak manusia, sehingga pelanggaran keadilan akan menyebabkan kejahatan dan kerugian.

Beberapa aspek pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang dicertuskan oleh Ibnu Taimiyah ialah mendukung pada kemaslahatan masyarakat guna membangun tata kelola yang baik dan benar. Maka Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah sebagai institusi yang untuk membangun sektor-sektor penting seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi

karena itu semua dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Berikut adalah pandangan berkenaan tentang keadilan yang tertuju pada beberapa aspek untuk membangun *Good governance* atau pemerintahan yang baik yang telah terangkum dalam table berikut:

Tabel 1. Aspek Pemerintah Menurut Ibnu Taimiyah

NO	Aspek	Tujuan
1	Politik	Membangun sistem pemerintahan yang baik dan berkeadilan
2	Sosial	Menciptakan masyarakat yang memilki sifat *amar ma'ruf nahi munkar*
3	Pendidikan	Membangun akhlak, gaya hidup yang baik, serta menyebarkan kebaikan kepada sesame
4	Ekonomi	Menciptakan kestabilan harga pasar

Dari tabel 1 diatas maka dapat ditemukan bahwa aspek pemerintah menurut Ibnu Taimiyah yang *Good governance* ada empat hal yang utama meliputi politik yang berkeadilan, sosial yang menciptakan sifat *amar ma'ruf nahi munkar,* pendidikan yang membangun sesama dan akhlak serta ekonmi yang stabil bagi kebutuhan masyarakat.

Tata Kelola Pemerintah Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia Berdasarkan Pemerintah Desa

Tata kelola pemerintahan yang baik terhadap masyarakat Indonesia mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pemerintah dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan informasi secara terbuka, serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran. Berdasarkan kepala Desa Jogoroto mengadopsi prinsip keadilan sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan desa, sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan keadilan sebagai inti dari pemerintahan yang sah. Distribusi bantuan secara adil dan transparan bertujuan untuk mencegah kecemburuan sosial, menciptakan harmoni di masyarakat, serta menunjukkan tanggung jawab moral dan etika dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu juga adanya kegiatan khusus bagi para pemuda dan juga lansia sehingga pemerintah dapat melayani semua masyarakat dengan baik, sebagaimana contoh berikut:



Gambar 1. Layanan Terapi Akupuntur Bagi Lansia Desa Jagoroto

Dimana dalam gambar 1 diatas terlihat pemerintah sangat memerhatikan masyarakatnya disegala jenis usia termasuk lansia. Dimana program ini dilakukan 1x dalam setahun. Hal ini merupakan bentuk peduli sosial. Hal ini diperjelas segaimana pernyataan kepala desa:

"Saya sangat percaya bahwa prinsip keadilan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah itu menjadi kunci. Di desa kami, kami berusaha membagi bantuan secara adil dan terbuka agar tidak terjadi kecemburuan sosial." Ungkap Kepala Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang

Begitupula Kepala desa Diwek menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pemerintahan desa melalui musyawarah dusun, yang sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) yang dikedepankan oleh Ibnu Taimiyah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kepala desa menghindari sikap otoriter dan menunjukkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan memaksakan kehendak pemimpin.

"Kami mulai menerapkan musyawarah dusun sebagai bentuk partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan. Ini selaras dengan pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya mendengar suara rakyat." Ungkap Kepala Desa Diwek, Kabupaten Jombang

Di Kota lainnya juga tidak jauh berbeda, misal di Desa Badas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab publik. Ini sesuai

dengan ajaran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin yang wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Pelaporan dana melalui media terbuka menjadi upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana contoh kegiatan bersama yang diikuti oleh warga secara langsung dan serentak:



Gambar 2. Acara dan Pelaporan Bersama Kegiatan Desa Secara Umum

Dimana dalam gambar 2 diatas menunjukkan bahwa acara dan pelaporan kegiatan desa bersama dilaporkan kepada masyarakat setempat yang disertai kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa desa melakukan dengan baik terkait bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.

Hal ini juga diungkapkan dari pernyataan:

"Akuntabilitas itu penting. Kami laporkan semua penggunaan dana desa lewat papan informasi dan grup WhatsApp warga. Menurut saya, ini bentuk tanggung jawab moral seperti yang diajarkan Ibnu Taimiyah." Ungkap Kepala Desa Badas, Kabupaten Kediri.

Pernyataan diatas juga dicerminkan kepala desa Adan-Adan terhadap amanah sebagai nilai utama dalam kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah. Dengan membentuk tim pengawas independen, kepala desa menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan menghindari praktik otoritarianisme atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tata kelola menjadi lebih objektif dan terpercaya. Bahkan uniknya karena desa ini adalah banyak situs sejarah, dimana semua situs dijaga oleh koordinator tertentu sehingga bisa dikelola dengan baik termasuk sejarah dan dikerjakan secara sama-sama masyarakat.

"Kalau saya baca-baca, Ibnu Taimiyah itu menekankan amanah sebagai dasar kepemimpinan. Di desa kami, kami bentuk tim independen untuk mengawasi dana desa supaya kepala desa tidak sewenang-wenang." Ungkap Kepala Desa Adan-Adan, Kabupaten Kediri.

Hal lain juga serupa, di Kelurahan Karangbesuki menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perspektif Islam tidak hanya sebatas prosedur administratif, tetapi juga terkait erat dengan karakter dan moral pemimpin. Ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang menuntut agar pemimpin memiliki integritas spiritual dan etika pelayanan yang tinggi. Pelatihan ini menjadi bentuk upaya peningkatan kapasitas moral aparatur desa. Kepala kelurahan Karangbesuki menunjukkan refleksi pribadi sebagai seorang santri yang mengenal pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan, sehingga menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum sempurna, namun sudah diupayakan dalam berbagai aspek seperti gotong royong sosial dan perhatian terhadap pendidikan warga miskin. Ini menunjukkan adanya kesadaran normatif dan usaha praksis dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan lokal, meskipun tantangan tetap ada.

"kami di pemerintah ini bisa dikatakan sudah melakukan upaya yang baik dalam tata kelola. Karena saya santri, saya memahami terkait konsep Ibnu Taimiyah terkait pemerintah. Di sini hal itu sudah diupayakan terlaksana dengan baik termasuk saya kira di Indonesia walaupun memang dalam prakteknya belum maksimal. Kalau di Kelurahan Karangbesuki sudah diterapkan misal sosial adanya gotong royong, bantuan dll, kemudian dari segi pendidikan adanya bantuan khusus orang yang memiliki kurang pendidikan dan lainnya" Ungkap Kepala Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang.

PEMBAHASAN

Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik terhadap masyarakat Indonesia mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Pemerintah dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menyampaikan informasi secara terbuka, serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran (Suryana, 2016). Selain itu, pelayanan publik harus dijalankan secara profesional, adil, dan tanpa diskriminasi, demi menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Stefana & Lubis, 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, tata kelola yang baik dapat mendorong

pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini sesuai dengan istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki arti menyuruh untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memiliki wewenang pada suatu negara terhadap kebutuhan di masyarakat (Astomo, 2014). Pemerintahan adalah struktur yang mana didalamnya ada sistem lembaga negara yang memiliki peran dalam menjalankan roda kepemimpinan yang berlaku pada sebuah Negara baik dari atas hingga ke bagian lembaga bawah yang merupakan bagiannya. Dengan adanya pemimpin, maka dapat terbentuklah yang namanya sistem tata kelola yang baik guna membangun sistem solid dan penuh dengan tanggung jawab dan sejalan dengan prinsip hak manusia (Kamaluddin, 2019). Di Indonesia pemerintah baik dari tingkat atas dan bahwa dalam menjalankan tata pemerintahan bersumber dari peraturan undang-undang dan pancasila yang berlaku untuk kepentingan semua masyarakat (Ibad, 2021).

Ibnu Taimiyah yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang lahir pada masa Abbaiyah dengan berbagai gejolak pada waktu itu yang banyak mempelajari tentang pemerintah yang baik berdasarkan kondisi waktu itu (H. Nasution, 2020). Pemikirannya ketika berusia 30 tahun diakui oleh para ulama besar karena ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama sehingga dijaikan imam pemikiran Islam (Massadi, 2025). Dalam pandangan *Good governance* atau sistem pemerintahan yang baik menurut Ibnu Taimiyah telah mendeklarasikan pandangan tentang keadilan, baginya keadilan merupakan titik terpenting dalam sistem pemerintahan dengan keadilan juga semua sektor pada seluruh penerintahan akan berjalan dengan baik (Ash-Shufi et al., 2021). Negara harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, menurut Ibn Taimiyah. Menurutnya, keadilan sosial berkaitan dengan hak-hak manusia, sehingga pelanggaran keadilan akan menyebabkan kejahatan dan kerugian. Jadi, apa pun bentuk, nama, atau tanda yang digunakan oleh pemerintah dan negara, sejauh itu membantu mewujudkan keadilan sosial, harus dipatuhi dan didukung sepenuhnya (Taufiqurahman & Soejadi, 2022). Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pemerintah sebagai Lembaga institusi yang sangat penting, beliau juga menyatakan bahwa ada dua hal dalam penetapan sebuah negara dan sektor kepemimpinana negara dengan apa adanya. Titik pusat nya adalah mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan mencegah keburukan atau *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan dari itu semua ialah untuk mengabungkan secara menyelurh yang didalamnya juga mengajak manusia melaksanakan praktik politik, sosial, pendidikan dan ekonomi yang baik dan benar (Kholid, 2024).

Selain itu, prinsip konsep *Good governance* dalam pandangan Ibnu Taimiyah harus berprinsip kepada adagium yang populer, beliau menyatakan bahwa, "Manusia tidak berselisih bahwa balasan dari perbuatan zalim adalah kebinasaan, sedangkan balasan dari sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa 'Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun beriman". Maka dengan hal tersebut tata kelola pemerintah yang baik akan mudah terwujud baik di tingkat atas dan bawah. Sehingga aspek pemerintah menurut Ibnu Taimiyah yang *Good governance* berpegang pada empat hal yang utama meliputi politik yang berkeadilan, sosial yang menciptakan sifat *amar ma'ruf nahi munkar,* pendidikan yang membangun sesama dan akhlak serta ekonmi yang stabil bagi kebutuhan masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan ini mengandung prinsip-prinsip dasar *good governance* seperti keadilan, amanah, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pengawasan. Dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia, pemikiran ini menjadi relevan sebagai dasar moral dan filosofis dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ibnu Taimiyah memandang bahwa kekuasaan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan demi keuntungan pribadi penguasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian prinsip *good governance* menurut Ibnu Taimiyah telah mulai diterapkan di Indonesia, terutama dalam pemerintahan desa. Misalnya, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat telah menjadi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan desa, melalui forum musyawarah desa (musdes) maupun publikasi penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam klasik dapat diintegrasikan ke dalam praktik pemerintahan modern yang demokratis. Berdasarkan data Lembaga Administrasi Negara tahun 2023, sekitar 72% pemerintah daerah telah mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan nilai-nilai ini masih bersifat variatif, tergantung pada komitmen pemimpin lokal dan kapasitas birokrasi di wilayah masing-masing. Di sinilah pentingnya pendekatan moral sebagaimana ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah, yang menekankan pentingnya karakter pemimpin yang jujur, adil, dan takut kepada Tuhan.

Wawancara dengan sejumlah kepala desa di Jawa Timur memperkuat temuan ini. Kepala Desa Jogoroto, Kabupaten Jombang, menegaskan bahwa prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam pembagian bantuan sosial agar tidak memunculkan ketimpangan. Ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, bahwa pemimpin harus berlaku adil karena keadilan adalah dasar tegaknya sebuah negara. Sementara itu, Kepala Desa

Diwek, Kabupaten Jombang, menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pembangunan melalui forum musyawarah dusun. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin lokal memahami bahwa kebijakan tidak boleh bersifat top-down semata, tetapi perlu melibatkan aspirasi warga. Prinsip ini mencerminkan nilai *syura* (musyawarah), yang juga ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang Islami dan efektif.

Di sisi lain, Kepala Desa Badas, di Kabupaten Kediri menunjukkan bentuk akuntabilitas sosial dengan memanfaatkan media digital seperti WhatsApp grup warga untuk menyampaikan laporan keuangan desa. Ini adalah bentuk adaptasi modern dari prinsip *hisbah* atau pengawasan sosial dalam Islam yang diteorikan oleh Ibnu Taimiyah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Begitupula Kepala Desa Adan-Adan, Kabupaten Kediri dan Kelurahan Karangbesuki Kota Malang, juga mencerminkan prinsip amanah dalam kepemimpinan dengan membentuk tim pengawas independen terhadap penggunaan dana desa. Hal ini sangat relevan dengan konsep *al-amanah* yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin, baik oleh rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Maka dari itu, pelaksanaan yang maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia terutama di daerah masing-masing menjadi tanggungjawab daerah baik kepada masyarakat muda hingga lansia. Selain iti, juga pentingnya pelatihan etika pelayanan publik sebagai upaya membentuk budaya birokrasi yang santun dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, ini mencerminkan pentingnya *akhlaq al-'amiliyah* (etika profesional) dalam memimpin. Hal ini sejalan dengan penelitian di Prambon, Sidoarjo (Sofia & Fitriyah, 2022) menemukan bahwa **partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi** secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Sehingga semakin pemerintah melakukan maka akan berdampak baik dan terkendali keuangan desa. Begitupula, studi di Kabupaten Ngawi oleh (Sudrajat & Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa **partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi** meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, meski sistem pengendalian internal menunjukkan pengaruh tidak signifikan tanpa dukungan profesionalisme. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dari Ibnu Taimiyah memiliki relevansi terhadap kemajuan suatu pemerintah termasuk desa sehingga berdampak bagi masyarakat.

Meskipun telah banyak upaya positif, hambatan tetap ada. Salah satu tantangan besar adalah inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di lapangan. Seperti yang tercermin dalam laporan ICW 2023, masih ditemukan ratusan kasus korupsi yang mencerminkan lemahnya kontrol moral dan integritas birokrasi (Sutawijaya, 2020). Ini

menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* tidak cukup hanya dengan sistem, tetapi juga perlu dukungan spiritualitas dan kesadaran etis sebagaimana dikembangkan oleh pemikiran Islam klasik. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah dengan konsep *good governance* modern sangat potensial untuk memperkuat pembangunan masyarakat Indonesia. Pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan partisipatif akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya membangun kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kokoh secara moral dan religius, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah merupakan seorang cendekiawan muslim yang memiliki banyak rekognisi di kalangan cendekiawan lainya, karena beliau memiki banyak karya dan gagasan, terutama seputar pemerintahan. Beberapa aspek pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang dicertuskan oleh Ibnu Taimiyah ialah mendukung pada kemaslahatan masyarakat guna membangun tata kelola yang baik dan benar. Dalam pemerintahan, seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemerintahannya untuk membangun sisitem pemerintahan yang baik maka dia harus memiliki pengaruh besar atas orang-orang yang dipimpinnya yang menghasilkan landasan penting yang telah beliau deklarasikan seperti ranah kekuasaan, sumber hukum, kedaulata, peran ulama-umara, bentuk negara dan proses politik. Maka Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pemerintah sebagai institusi yang untuk membangun sektor-sektor penting seperti politik, sosial, pendidikan dan ekonomi karena itu semua dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Bentuk implementasinya di pemerintah Indonesia dapat dicerminkan dari beberapa daerah Desa di Jawa Timur. Dimana dari desa yang diteliti, integrasi nilai-nilai pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah dengan konsep *good governance* modern di Desa sangat potensial untuk memperkuat pembangunan masyarakat Indonesia. Bentuk pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan partisipatif akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat serta selalu melibatkan masyarakat adalah bentuk dari kebijakan yang sesuai dengan *Good Governance* dari Ibnu Taimiyah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan pemikiran klasik Islam, khususnya gagasan Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan, ke dalam praktik tata kelola

pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai *good governance* yang digagas oleh Ibnu Taimiyah seperti keadilan, amanah, partisipasi, dan akuntabilitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dalam konteks pemerintahan desa di Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang governance berbasis nilai Islam, yang selama ini masih relatif minim dalam studi-studi pemerintahan lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, aparatur desa, dan pendamping masyarakat dalam menyusun strategi tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga kuat secara etis dan spiritual.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah 1) kajian yang lebih mendalam dan luas dengan melibatkan wilayah yang lebih beragam, baik secara geografis maupun kultural, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi nilai-nilai *good governance* menurut Ibnu Taimiyah dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. 2) Menggunakan metode campuran (*mixed methods*), dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga tidak hanya mendapatkan pemahaman mendalam dari sisi normatif dan etis, tetapi juga dapat mengukur tingkat efektivitas implementasi prinsip-prinsip tersebut secara statistik. 3) Peneliti ke depan juga dapat menelaah keterkaitan antara nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan indikator kinerja pembangunan desa, seperti tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, dan kualitas pelayanan. Hal ini penting untuk memperkuat argumentasi bahwa nilai-nilai keislaman dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, bersih, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhlil, F. D. (2021). Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *17*(1), 52–68. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(3), 401–420. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/4417

Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, *1*(1), 55–72. https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/1402/1022

Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu*

Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, *3*(1), 222–228. https://core.ac.uk/download/pdf/229023113.pdf

Kholid, H. H. (2024). Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan dan Relevansinya terhadap Kriteria Calon Pemimpin Rakyat di Negara Indonesia. *Journal for Islamic Studies*, *7*(4), 173. https://unisapressjournals.co.za/index.php/JIS

Massadi, L. G. R. A. (2025). *Profil Ibnu Taimiyah*. Www.Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/publication/393007294

Muslimin, A. (2020). *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab*. [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG]. https://repository.radenintan.ac.id/14051/1/Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah.pdf

Nasution, H. (2020). *Ibn Taimiyah Biografi Singkat*. Www.Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/publication/347354939

Nasution, S., Ibrahim, I. A. Bin, & Rahman, M. B. H. A. (2023). Amalan Tata Kelola Negara Yang Baik (Good Governance) Dalam Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Al-Khattab Dan Kesannya Dalam Pembangunan Modal Insan. *International Conference on Syariah & Law (ICONSYAL)*, *2*(2), 20. https://conference.uis.edu.my/iconsyal/images/2023/eproceeding/1003.pdf

Noveri, I. (2019). Good Governance: Praktikpada Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. *STJSP: Journal Social and Political*, *5*(3), 129. https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/STJSPS/article/view/278

Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The Role of Community Participation, Accountability, and Transparency on the Effectiveness of Village Fund Management. *Village Development*, *13*(2), 93–119. https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/819

Stefana, M., & Lubis, K. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Disnakertrans Sumut. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *5*(1), 45. https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/5885

Sudrajat, M. A., & Nugroho, A. T. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *EDUNOMIKA*, *6*(2), 29–42. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/6190

Suryana, A. (2016). Membangun Kepemimpinan Yang Menyenangkan. *PEDAGOGIA : Urnal Ilmu Pendidikan*, *12*(1), 32. https://doi.org/10.17509/pedagogia.v12i1.3299

Sutawijaya, D. D. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong. *Gema Keadilan*, *7*(2), 84–96. https://doi.org/10.14710/gk.2020.8948

Syam, M. B. (2015). Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam). *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *1*(1), 157. https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/10

Taufiqurahman, & Soejadi. (2022). *Konsep keadilan Ibn Taimiyah dan kontribusinya bagi pemahaman Pancasila*. Universitas Gajah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/19040